



# RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2021





**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Sumedang**

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Sumedang.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 yang telah disahkan.	✓			

Sumedang, Agustus 2020  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Sumedang  
 Kepala,

**BPKAD**

UUS SUNDAWAN, SE.,MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19601023 198302 1 001



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021**

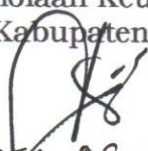
Pada hari ini selasa tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Tim Penyusun Rencana Kerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 dan perwakilan Tim Verifikasi RENJA BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu* : Sistematika Rencana Kerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD ) sesuai dengan lampiran C.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan Substansi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program dan kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
- Kedua* : Perumusan program, kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan prakiraan target Tahun 2022 yang diestimasikan;
- Ketiga* : Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun RENJA  
Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sumedang


  
SONDJAJA, S.Sos., MM  
NIP. 197112141995031002

Tim Verifikasi RENJA  
BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

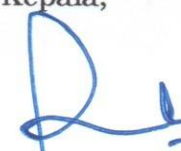
  
.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Kepala,

  
UUS SUNDAWAN, SE.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601023 198302 1 001

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kab. Sumedang  
Kepala,

  
Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690212 198903 2 005



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021**

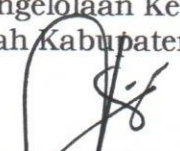
Pada hari ini selasa tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Tim Penyusun Rencana Kerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 dan perwakilan Tim Verifikasi RENJA BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu* : Sistematika Rencana Kerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD ) sesuai dengan lampiran C.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan Substansi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program dan kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
- Kedua* : Perumusan program, kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang** Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan prakiraan target Tahun 2022 yang diestimasikan;
- Ketiga* : Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun RENJA  
Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sumedang

  
.....  
SONDJAJA, S.Sos., MM  
NIP. 197112141995031002


Tim Verifikasi RENJA  
BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

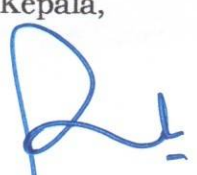
  
.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Kepala,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kab. Sumedang  
Kepala,

  
.....  
UUS SUNDAWAN, SE.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601023 198302 1 001

  
.....  
Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690212 198903 2 005



**FORMAT PENGENDALIAN**  
**VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

PERANGKAT DAERAH : **RKPD**

NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			✓	lampiran tim penyusun kepres Opd → kepres. Seleksi opd → Seleksi. <span style="float: right;">Saja.</span>
2	Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :	<b>Pedoman Lampiran C.5 Hal 400 (Permendagri 86 Th. 2017)</b>			
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓		
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓		ditambah kan . Permendagri no 70 th 2019 " 90 th 2019 " 40 th 2020 Perbub no. 66 th 2020
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	✓		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019</b>					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel	a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	✓		Belum menjawab Jumlah naras: 1 point a s/d f
		b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;			
		c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;			
		d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;			
		e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan			
		f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.			
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.2)	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.	✓		
	2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;	✓		
		b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;	✓		
		c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	✓		?
		d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan	✓		



NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
		e. <i>Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.</i>	✓		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, (disajikan dalam Tabel 2.3)	a. <i>Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</i>			Belum menjelaskan point a s/d c.
		b. <i>Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</i>			
		c. <i>Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda</i>			
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, (disajikan dalam Tabel 2.4, Hasil Musrenbang)	<i>Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;</i>			tabel 2.4. di tempelkan walaupun tidak ada → di nilai kan
		<i>Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;</i>			
	<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>				
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	<i>Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</i>	✓		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	<i>Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah</i>	✓		
	3.3. Program dan Kegiatan	a. <i>Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,</i>	✓		
		b. <i>Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,</i>	✓		
		c. <i>Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya</i>	✓		
	<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>		✓		
	<b>BAB V : PENUTUP</b>	a. <i>Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</i>			Perlu Belan dan pelaksanaan
		b. <i>Kaidah-kaidah pelaksanaan.</i>			
		c. <i>Rencana tindak lanjut, Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.</i>			
<b>3</b>	<b>TABEL - TABEL</b>				
	Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020	<i>ditandatangani Kepala Perangkat Daerah</i>	✓		
	Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....		✓		
	Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021		✓		



NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
	Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021		✓		
	Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sumedang ✓	Sesuai format renja hasil input dalam sistem RKPD Online (Permendagri 13 Tahun 2006)	✓		lihat Renja Y matri 3.1.
	Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sumedang ✓	Sesuai format renja hasil input dalam SIPD (Permendagri 90 Tahun 2019)			↑ lihat Renja 20
	Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 ✓	Sesuai Format RKPD hasil input dalam sistem RKPD Online (Permendagri 13 Tahun 2006)			lihat Renja Y matri 4.1
	Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021	Sesuai Format RKPD hasil input dalam SIPD (Permendagri 90 Tahun 2019)			↑ lihat Renja 20

TIM VERIFIKASI



.....





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan PrabuGajahAgung No. 9 TELP. (0261) 201875, FAX. (0261) 201875 Kode pos 45323

Sumedang

**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 990/Kep.006/BPKAD/2020  
Lampiran : 7 (Tujuh) lembar

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- c. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas, maka diperlukan perubahan anggota Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayadunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).



Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor **990/Kep. /BPKAD/2020** tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai tugas yaitu:

Ketua:

- a. Mengesahkan dan menandatangani RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Mengesahkan dan menandatangani Renja SKPD;
- c. Mengendalikan Rapat Forum SKPD.

Sekretaris:

- a. Memverifikasi RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Memverifikasi Renja SKPD;
- c. Memimpin diskusi Forum SKPD.

Anggota:

- a. Menyusun RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Menyusun Renja SKPD;
- c. Membuat konsep paparan Kepala Badan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Forum SKPD;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 13 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



**UUS SUNDAWAN, SE., MM**

Pembina Utama Muda


NIP. 19601023 198302 1 001



Lampiran V : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
 Nomor : 990/Kep. 006/BPKAD/2020  
 Tanggal : 13 Januari 2020  
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyusunan Renja SKPD

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	UUS SUNDAWAN, SE.,MM	196010231983021001	Pembina Utama Muda	IV/c	Ketua
2	Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc	196903151997031002	Pembina	IV/a	Sekretaris
3	MIA ROHMIATIN S, S.STP.,M.Si	198506052004122001	Penata TK.I	III/d	Anggota
4	SITI KOMARIAH, S.Sos.,MSE.,MA	197305091996032001	Pembina	IV/a	Anggota
5	Dra. Hj. KUMALA HERMAWATI	196504051994032002	Penata TK.I	III/d	Anggota
6	N. RITA KOMALA, S.Sos	197011111990032005	Penata TK.I	III/d	Anggota
7	MARIA FITRIAGISTA, S.Sos	198008282010012004	Penata	III/c	Anggota
8	TUTI HERMAWATI, SE	197510052007012011	Penata	III/c	Anggota
9	IDRIS DARWANTO	-	-	-	Anggota
10	REGINA WIDYA UTAMI, SE.,MM	-	-	-	Anggota
11	JAJANG WIJANA, SE	-	-	-	Anggota
12	RAGIL S DWIGUNA, S.Kom	-	-	-	Anggota
13	RITA YULIAN	-	-	-	Anggota
14	DEBBY A. YUKORURI, SE	-	-	-	Anggota
15	ANIS SAJIDIN, SE	-	-	-	Anggota
16	BUDI SULISTIA, SE	-	-	-	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG,

  
**UUS SUNDAWAN, SE., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19601023 198302 1 001





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, No.Tlp: (0261) 201775,

**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 900/Kep. 081 /BPKAD/2020

Lampiran : 3 (Tiga) lembar

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- c. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas, maka diperlukan perubahan anggota Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayadunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODI4NZEX



Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor **990/Kep. 004/BPKAD/2020** tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai tugas yaitu:

Ketua:

- a. Mengesahkan dan menandatangani RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Mengesahkan dan menandatangani Renja SKPD;
- c. Mengendalikan Rapat Forum SKPD.

Sekretaris:

- a. Memverifikasi RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Memverifikasi Renja SKPD;
- c. Memimpin diskusi Forum SKPD.

Anggota:

- a. Menyusun RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Menyusun Renja SKPD;
- c. Membuat konsep paparan Kepala Badan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Forum SKPD;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**H. UUS SUNDAWAN, SE., M.M**  
NIP. 196010231983021001

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OD14NZEX



Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang  
 Nomor : 990/Kep. 081 /BPKAD/2020  
 Tanggal : 05 Mei 2020  
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan  
 Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyusunan Renja Perubahan SKPD

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	UUS SUNDAWAN, SE.,MM	196010231983021001	Pembina Utama Muda	IV/c	Ketua
2	Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc	196903151997031002	Pembina	IV/a	Sekretaris
3	SITI KOMARIAH, S.Sos.,MSE.,MA	197305091996032001	Pembina	IV/a	Anggota
4	MARIA FITRIAGISTA, S.Sos	198008282010012004	Penata	III/c	Anggota
5	TUTI HERMAWATI, SE	19751005 2007012011	Penata	III/c	Anggota
6	IDRIS DARWANTO	-	-	-	Anggota
7	REGINA WIDYA UTAMI, SE.,MM	-	-	-	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

A circular official stamp of the Kabupaten Sumedang government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG' with a star on the left. The center of the stamp features the acronym 'BPKAD' in large, bold letters.

**UUS SUNDAWAN, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601023 198302 1 001



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyusun Dokumen Rencana Awal Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2019.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, Agustus 2020  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Kepala,



**UUS SUNDAWAN, SE.,MM**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19601023 198302 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	.....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019</b>	.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dan Capaian Reanstra Tahun 2018- 2023	.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	.....	17
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	40
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	.....	42
3.3. Program dan Kegiatan	.....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020</b>	.....	60
4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	.....	60
4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	65



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2019 .....	12
Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Sumedang .....	13
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Terhadap Indikator RPJMD Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.4. Capaian Indikator Rencana Program SKPD Tahun 2019 .....	16
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang .....	18
Tabel 2.6. Analisa SWOT .....	32
Tabel 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 .....	35
Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Sumedang .....	41
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sumedang .....	46
Tabel 4.1. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 .....	64
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang .	74



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja BPKAD
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja BPKAD
  - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Renja BPKAD
  - Pengolahan data dan informasi
  - Analisis gambaran pelayanan BPKAD
  - Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2018
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD
  - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
  - Perumusan tujuan dan sasaran
  - Telaahan usulan program dan kegiatan
  - Perumusan kegiatan prioritas
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKAD
  - Penyempurnaan rancangan Renja BPKAD
  - Pembahasan forum SKPD
  - Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
- c. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD bertujuan untuk :

  - Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD
  - Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah



- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BPKAD Tahun Anggaran 2021
- d. Penyusunan dan Penetapan Renja BPKAD Tahun 2021
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021
  - Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
  - Pengesahan oleh Kepala Daerah
  - Penetapan Renja oleh Kepala BPKAD

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 memuat mengenai rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang disusun berdasarkan acuan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2021 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
  33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
  36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
  39. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puser Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
  40. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
  41. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 66);
  42. Keputusan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2020 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.



### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
4. Diketuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi Badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap Badan.

10. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

*Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renstra Kementerian Keuangan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.*

#### 1.2. Landasan Hukum

*Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK dan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.*

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Tahun 2021.*

#### 1.4. Sistematika Penulisan

*Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.*

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2018**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023

*Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya.*



- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sumedang  
*Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan Indikator RPJMD dan Indikator Rencana Program SKPD dalam RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD*
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Sumedang  
*Berisikan mengenai:*
  - a. *Tingkat kinerja pelayanan BPKAD*
  - b. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD*
  - c. *Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023*
  - d. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD*
  - e. *Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021*
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
*Membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan*
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021  
*Menjelaskan tentang kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD*

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat  
*Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD*
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021  
*Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD*

3.3. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021

1. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, selain mengacu pada Renstra BPKAD, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD pada Tahun 2019, karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan BPKAD pada tahun-tahun mendatang.

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 tentang BPKA berganti nama menjadi BPKAD.**

Adapun tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tertibnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut-turut pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan Penetapan APBD Tepat Waktu yang telah diraih secara berturut-turut pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

**Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 7.281.859.284,00. Secara umum Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk dalam kategori sedang dengan realisasi anggaran semester 1 (satu) Rp. 3.399.866.885,00 atau 46.69 %.**

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata-rata Capaian Indikator
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100
	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
<b>CAPAIAN TAHUN 2019</b>						<b>100</b>

Adapun capaian pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2019**  
**Kabupaten Sumedang**

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah								
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	20	4	4	4	100	4	12	60,00
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	20	4	4	4	100	4	12	60,00
	Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	20	4	4	4	100	4	12	60
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	10	2	2	2	100	2	6	60
	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	10	1	1	1	100	1	3	0
	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	10	1	1	1	100	1	3	30
	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	10	2	2	2	100	2	6	60
	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60,00
	Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	15	3	3	3	100	3	9	60
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	10	2	2	2	100	2	6	60
	Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	20	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	10	2	2	2	100	2	6	60
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	20	2	2	2	100	2	6	30
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	56	56	56	100	56	168	60
	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56	0	56	56	100	0	56	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	224	0	0	0	0	0	0	0
	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	3360	0	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	1	1	1	0	1	3	60
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	56	56	56	100	56	168	60,00
	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	120	24	24	24	100	24	72	60,00
	Penyusunan RKBMD dan RKPMD	Jumlah SKPD yang dikelola	10	2	2	2	100	2	6	60,00
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	280	56	56	56	100	56	168	60
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	5	1	1	1	100	1	3	60
	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5	1	1	1	100	1	3	60
	Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	4	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	4	0	0	0	0	0	0	0

Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Terhadap Indikator RPJMD Tahun 2019**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100
2.	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3.	Nilai Sakip	B	B	100
4.	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.15%	34.15%	35.51
5.	Jumlah Inovasi	1	1	100
6.	Indeks Pembangunan Zona Integrasi/ Reformasi Birokrasi	65	-	-

Adapun Capaian Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Rencana Program SKPD**

Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun Renstra	Capaian Kinerja Program Tahun 2019	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran (jumlah DPA yang Tidak bermasalah)	Persen	92	95.42	103
	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100	100
	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	91	92.5	101
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	85	94.50	111
	Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)	Persen	87	88	101



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP
2	APBD Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	BB	A	A	AA	B	-	-	-	-	A
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96,15	96,25	96,50	97	97,10	93,73					97
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			65	70	75	80	85	-	-	-	-	-	80



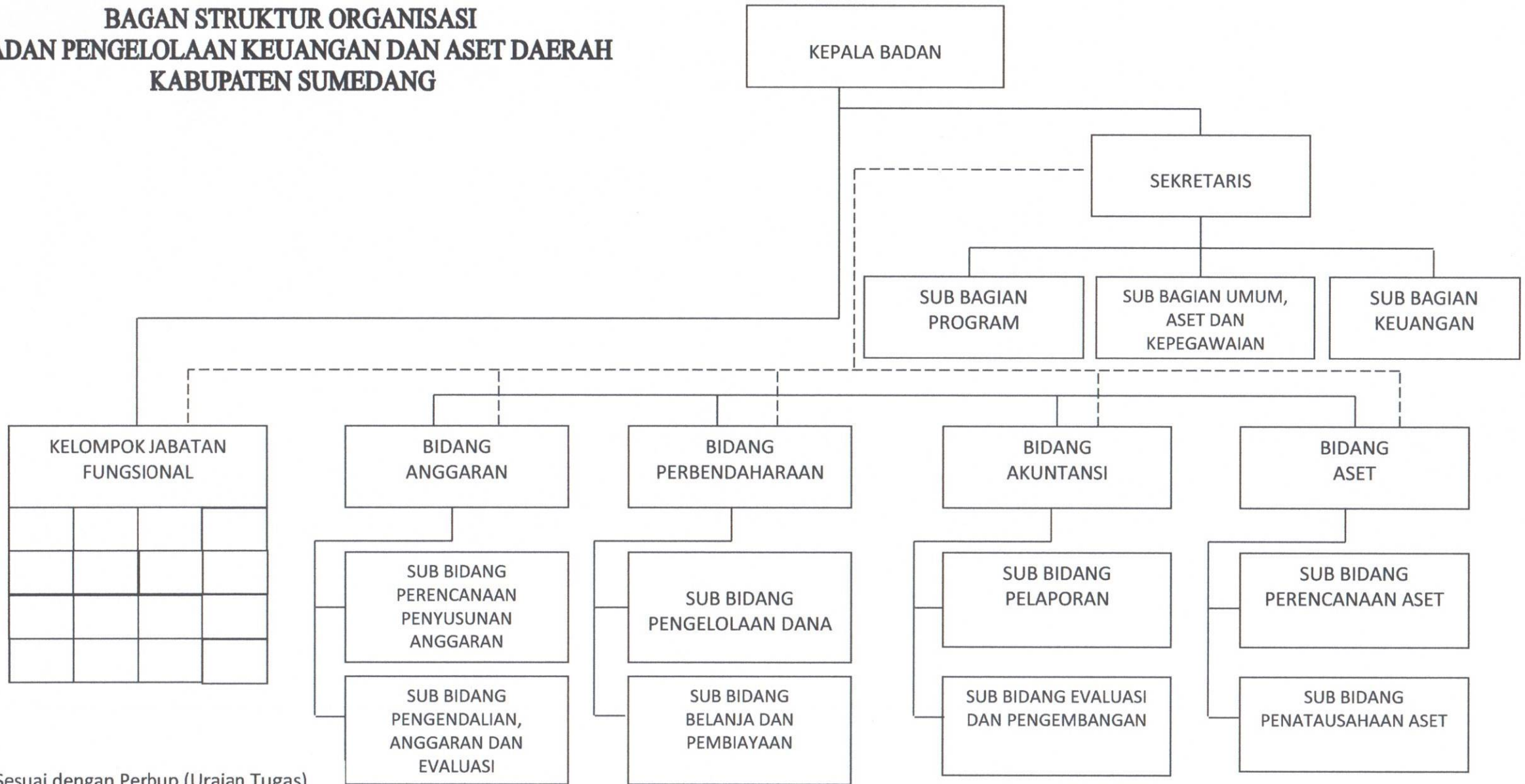
### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai dengan Perbup (Uraian Tugas)  
No. 26 Tahun 2016



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dibantu oleh:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pelaporan;
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Aset
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. menyusun sistem informasi;
- j. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
- b. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan keuangan dan aset;
- c. menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;



- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### **3. Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah ;
  - g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
  - h. merumuskan dana transfer desa; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/draft SPD;
- c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;



- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

## **5. Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;

- j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
- k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;
- m. merumuskan laporan barang milik daerah;
- n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah selama Tahun 2017 masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dengan seringnya terjadi perubahan sistem dan aturan pengelolaan keuangan dan aset serta terkadang adanya perubahan petugas pengelola keuangan dan aset SKPD, sehingga kompetensi SDM yang baru masih kurang optimal;
2. Struktur APBD belum ideal;
3. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
4. Penatausahaan aset daerah belum optimal

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.



3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### **Analisis Lingkungan Internal**

#### **1. Kekuatan (*Strengths*)**

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;  
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;  
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 74 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;  
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.
5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.  
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Kelemahan (*weakness*)**

1. Kualitas SDM masih belum memadai;  
Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.

2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;  
Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.  
Sistem Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian.

## **Analisis Lingkungan Eksternal**

### *a. Peluang (Opportunities)*

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.  
Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;  
Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.
2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.  
Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. (SIPKD dan SIMDA BMD)



*b. Ancaman ( Threats )*

1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;  
Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya.  
Keterlambatan penyampaian berkas SPP/SPM, lap.  
Pertanggungjawaban dll.
2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.
3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;  
Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi.  
Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<p><b>Strategi Kd I :</b> Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</p>	<p><b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</p>
	K E L E M A H A N	<p><b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang</p>	<p><b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman</p>

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:





<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</li> <li>2. Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antara Pengelolaan Keuangan dan Aset.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.</li> </ol>
---	---	--

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pelaporan keuanganan aset daerah yang lebih baik;
2. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

#### **Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan BPKAD Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.



#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulaidari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja yang dilaksanakanoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Sumedang

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				7.014.990.387,46	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.974.268.346	
1	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	4 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	4 Dokumen	171.200.000,00	
2	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD.	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	4 Dokumen	95.000.000,00	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	BPKAD	Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022	2 Dokumen	351.150.000,00	
3	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	BPKAD	Jumlah Tim Verifikator	Tim Verifikator sebanyak 45 orang dan 55 SKPD	192.000.000,00	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Tersedianya RKA SKPD/PPKD T.A. 2022 Tersedianya P-RKA SKPD/PPKD T.A. 2021	55 SKPD dan 1 PPKD	185.700.000,00	
4	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	2 Dokumen	425.000.000,00	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2021	1 Raperda dan 1 Raperbup	292.300.000,00	
5	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	330.000.000,00	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKAD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD T.A. 2022	1 Raperda dan 1 Raperbup	329.000.000,00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
6	Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1 Raperda dan 1 Raperbup	367.000.000,00	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2021. Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2020	55 SKPD dan 1 PPKD	208.600.000,00	
7	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	BPKAD	Jumlah Dokumen APBD Murni	1 Raperda dan 1 Raperbup	505.067.587,46	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	BPKAD	Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	2 Dokumen	284.400.000,00	
8	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	185.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	BPKAD	Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah	6 Raperbup/Rakepbup/Raperda	305.300.000,00	
9	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	2 Dokumen	252.000.000,00	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Terbinanya aparatur perencanaan penganggaran daerah	1 Kali sosialisasi, 2 Buku APBD	373.286.256,00	
10	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	52.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022	4 Dokumen	382.600.000,00	
11	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	BPKAD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	55 SKPD dan 1 PPKD	173.000.000,00	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Tersedianya Data yang Akurat	100%	301.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
12	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	6 Raperbup/Rakebup/Raperda	405.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Tersedianya Data yang Akurat	100%	400.000.000	
13	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Kabupaten Sumedang	Buku Saku Murni dan Perubahan	2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)	184.475.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Tersedianya Pengelola Keuangan yang Baik dan Benar	100%	400.000.000	
14	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	1 Kali sosialisasi	100.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	228.423.000,00	
15	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	4 Dokumen	284.604.000	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 Raperda	292.802.350,00	
16	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	2 Dokumen	146.031.200	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	BPKAD	Tersedianya Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	56 SKPD	180.560.000,00	
17	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	1 Paket	210.797.180,00	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	56 SKPD	746.351.445,00	
18	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah SKPD yang dikelola	1 Paket	431.420.920,00	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	BPKAD	Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2021 Laporan Realisasi APBD Triwulanan I. II.	3 Dokumen	278.057.100,00	
19	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	4 Laporan	338.097.700,00	Penyusunan RKBMD dan RKPBM	BPKAD	Tersedianya Buku RKBMD dan RKPBM	2 Dokumen	50.000.000	
20	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	1 Paket	180.607.000,00	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	Tersedianya Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	5 Dokumen	200.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	3 dokumen	350.000.000,00	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	BPKAD	Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi	56 Berita Acara	120.000.000	
22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	BPKAD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Laporan	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Pembinaan Kepada Para Pengurus Barang	56 SKPD	210.000.000	
23	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperda /Dokumen	250.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersusunnya Laporan Hasil Monev	8 Dokumen	300.000.000	
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	1 Raperbub /Dokumen	314.000.000,00	Identifikasi Belanja Modal SKPD	BPKAD	Teridentifikasi Belanja Modal SKPD	5 Dokumen	50.000.000	
25	Sinergitas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	56 SKPD	500.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang	1 Sistem	110.000.000	
26	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen LRA	57 SKPD	100.000.000,00	Inventarisasi Aset	BPKAD	Tersedianya Dokumen Rincian Aset Tanah untuk Mendukung Penyusunan Neraca Keuangan dan Aset	1 Dokumen	128.750.000	
27	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD yang dikelola	55 SKPD, 55 Dokumen	110.000.000,00	Penyusunan Neraca Aset Daerah	BPKAD	Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	1 Dokumen	94.788.195	
28	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	1 sistem	142.000.000,00						
29	Inventarisasi Aset	Kabupaten Sumedang	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	1 dokumen	80.000.000,00						
30	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	1 dokumen	50.000.000,00						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
31	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	150 orang	200.000.000,00						
32	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	8 Dokumen	350.000.000,00						
33	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	2 Dokumen	72.000.000,00						
34	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5 Dokumen	300.000.000,00						
35	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5 Dokumen	60.000.000,00						
	<b>JUMLAH</b>				<b>7.014.990.387</b>					<b>6.974.268.346</b>	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan SKPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan Dokumen Perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten, sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Namun demikian semua usulan kegiatan BPKAD Tahun 2021, tidak ada satu pun usulan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga semua usulan program/kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

**Tabel. 2.7**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memiliki Tujuan "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)". Apabila ditelaah, Misi tersebut sesuai dengan sembilan program Nawa cita khususnya point ke 2 yaitu "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan".

Selain itu, terdapat juga keterkaitan dengan Misi Provinsi Jawa Barat 2019-2023 khususnya Misi ke-5, yaitu "Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, dengan Sasaran Misi yaitu Birokrasi Juara, APBD Juara, ASN Juara dan BUMD Juara".

Dari hasil telaahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang profesional.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Nasional</b>		
1	Meningkatkan tata kelola pengembangan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang	RPJMN 2015-2019	



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu);
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas internal perangkat daerah

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

**SEJAHTERA** Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**AGAMIS** Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**MAJU** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**PROFESIONAL** *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

**KREATIF** masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.



Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Tujuan** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

***” Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)”***

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kiranya perlu dipahami upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penjelasan Tujuan tersebut menggambarkan tata nilai yang mempunyai kecermatan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.



Tabel 3.2

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.	<b>PENUNJANG URUSAN</b>										13.215.747.346,00	18.631.205.471,00		
3.01.3.01.03.03.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	-					3.694.932.000,00	4.536.401.000,00		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
3.01.3.01.03.03.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			Kabupaten Sumedang			Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	610.660.000,00	671.726.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kabupaten Sumedang			Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan	12.00 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.440.305.000,00	1.691.035.500,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Sumedang			Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.00 Surat Kabar	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	100%	30.250.000,00	33.275.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten Sumedang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75.00 kali	Sinerginya Pembangunan	100%	649.065.000,00	514.947.300,00		
3.01.3.01.03.03.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi			Kabupaten Sumedang			Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	1.00 Paket	Tersampainya Informasi Pembangunan	100%	67.733.000,00	129.506.300,00		
3.01.3.01.03.03.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan			Kabupaten Sumedang			Tenaga Operasional Pengamanan	1.00 Paket	Terciptanya Pengamanan Kantor	100%	200.038.500,00	242.042.350,00		
3.01.3.01.03.03.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan			Kabupaten Sumedang			Jasa Kebersihan	1.00 Paket	Terciptanya Kebersihan di Ruang terbuka hijau	100%	281.678.500,00	353.846.350,00		
3.01.3.01.03.03.01.014.	Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang			Kabupaten Sumedang			Barang ATK dan Cetak	1.00 Paket	Terfasilitasinya pelayanan ketatausahaan se-Kabupaten Sumedang	100%	364.952.000,00	467.447.200,00		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah			Kabupaten Sumedang			Profil BPKAD	1.00 Dokumen	Tersedianya Informasi tentang BPKAD	100%	50.250.000,00	199.650.000,00		
3.01.3.01.03.03.01.024.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)			Kabupaten Sumedang			SOP BPKAD	-	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-		232.925.000,00		
3.01.3.01.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-					1.127.677.000,00	1.956.246.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	Terciptanya kenyamanan gedung kantor	100%	50.000.000,00			
3.01.3.01.03.03.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kabupaten Sumedang			Perlengkapan Kantor	1.00 Paket	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	419.271.000,00	626.999.400,00		
3.01.3.01.03.03.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Penataan Halaman Kantor/gedung kantor	1 -	Tercapainya kenyamanan dalam melakukan aktifitas kinerja bagi aparatur	100%	50.000.000,00			
3.01.3.01.03.03.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Gedung Kantor yang di Pelihara	1.00 Paket	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	90.492.000,00	264.541.200,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Sumedang			Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	1.00 Paket	lancarnya tugas kedinasan	100%	256.000.000,00	556.600.000,00		
3.01.3.01.03.03.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor			Kabupaten Sumedang			Peralatan Kantor	3.00 Jenis	Terciptanya kenyamanan kantor/gedung kantor	100%	151.914.000,00	387.105.400,00		
3.01.3.01.03.03.02.016.	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas			Kabupaten Sumedang			Rumah Dinas	1.00 Unit	Lancarnya pelayanan jabatan/kedinasan	100%	110.000.000,00	121.000.000,00		
<b>3.01.3.01.03.03.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	-					<b>184.162.000,00</b>	<b>202.578.200,00</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
3.01.3.01.03.03.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			Kabupaten Sumedang			Pakaian Dinas	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	41.624.000,00	45.786.400,00		
3.01.3.01.03.03.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kabupaten Sumedang			Pakaian Batik	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	41.624.000,00	45.786.400,00		
3.01.3.01.03.03.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga			Kabupaten Sumedang			Pakaian Olahraga	108.00 stel	Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	100.914.000,00	111.005.400,00		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-					167.508.000,00	184.259.025,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			Kabupaten Sumedang			Peningkatan kapasitas aparatur BPKAD	1.00 Paket	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	100%	167.508.000,00	184.259.025,00		
3.01.3.01.03.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-					250.750.000,00	413.636.600,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Kabupaten Sumedang			Laporan Kinerja BPKAD	6.00 Dokumen	Terevaluasinya Kinerja SKPD	100%	160.000.000,00	313.811.600,00		
3.01.3.01.03.03.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			Kabupaten Sumedang			Laporan Keuangan BPKAD	12.00 dokumen	Terevaluasinya Keuangan BPKAD	100%	90.750.000,00	99.825.000,00		
3.01.3.01.03.03.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	-					160.000.000,00	173.030.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.3.01.03.03.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD			Kabupaten Sumedang			Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA	6.00 Dokumen	Terarahnya pelaksanaan Pembangunan	100%	160.000.000,00	173.030.000,00		
3.01.3.01.03.03.08.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>				<b>Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</b>	-					30.250.000,00	33.275.000,00		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
3.01.3.01.03.03.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian			Kabupaten Sumedang			Data Kepegawaian BPKAD	4.00 Dokumen	Terevaluasi kinerja pegawai	100%	30.250.000,00	33.275.000,00		
3.01.03.	<b>KEUANGAN</b>										7.600.468.346,00	11.131.779.646,00		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
3.01.03.3.01.03.03.15.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran, Dokumen Pengajuan Pembayaran, Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD, Keakuratan Penatausahaan Aset</b>	-					7.600.468.346,00	11.131.779.646,00		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.01.	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen APBD Perubahan	4.00 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	171.200.000,00	334.804.800,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.04.	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	2.00 Dokumen	Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	100%	351.150.000,00	24.300.900,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.05.	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56.00 SKPD	Meningkatnya efektifitas Rancangan Penggunaan Anggaran T.A. 2021	100%	185.700.000,00	3.700.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.06.	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen APBD Perubahan	2.00 Raperda, Raperbup	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	292.300.000,00	279.609.300,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.007.	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen APBD Murni	2.00 Raperda, Raperbup	Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	329.000.000,00	279.609.300,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.008.	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56.00 SKPD	Optimalnya Efektivitas Pengguna Anggaran	100%	208.600.000,00	353.163.800,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.009.	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	2.00 Dokumen	Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	100%	284.400.000,00	134.934.396,00		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.012.	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	6 Raperbup, Rakepbup, Raperda	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah	100%	305.300.000,00	310.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.014.	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	1 kali sosialisasi, 2 Buku APBD	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan penganggaran daerah	100%	373.286.256,00	572.857.150,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.018.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1.00 Laporan	Terukurnya Kinerja Keuangan Pemda	100%	228.423.000,00	350.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.019.	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.00 Raperda	Tersusunnya Buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020	100%	292.802.350,00	700.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.021.	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual			Kabupaten Sumedang			Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	1.00 Sistem	Laporan Keuangan berbasis akrual yang akurat dan tepat waktu	100%	180.560.000,00	200.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.022.	Penyusunan RKBM dan RKPBM			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD yang dikelola	2.00 Dokumen	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Barang Milik Daerah	100%	75.000.000,00	100.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.023.	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	5 Dokumen	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	100%	414.350.000,00	350.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.024.	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	56.00 Berita Acara	Tersusunnya Neraca Aset yang Disertai dengan Daftar Rincian BMD yang Benar	100%	120.000.000,00	120.000.000,00		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.027.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	4.00 Dokumen	Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Rancangan Perbup Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022	100%	382.600.000,00	440.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.029.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56.00 SKPD	Meningkatnya Wawasan Pengurus Barang	100%	295.925.000,00	110.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.030.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD yang dikelola	56.00 SKPD	Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	400.000.000,00	400.000.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.031.	Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	1.00 Dokumen	Tersedianya Data Yang Akurat	100%	301.000.000,00	200.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.033.	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD yang dikelola	56.00 SKPD	Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	100%	746.351.645,00	500.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.034.	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen LRA	24.00 Dokumen	Buku Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III dan Semester I, II T.A 2019	100%	278.057.100,00	500.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.035.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	8 Dokumen	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan BMD dan Tertibnya Penatausahaan BMD	100%	410.713.000,00	350.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.036.	Identifikasi Belanja Modal SKPD			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5 Dokumen	Tertibnya Aset	100%	240.211.801,00	75.000.000,00		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.037.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	1.00 Sistem	Terpeliharanya Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset	100%	110.000.000,00	210.000.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.038.	Inventarisasi Aset			Kabupaten Sumedang			Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	1.00 Dokumen	Terbentuknya buku inventarisasi aset dan terpeliharanya data KIB dan KIR SKPD	100%	128.750.000,00	68.750.000,00		
3.01.03.3.01.03.03.15.039.	Penyusunan Neraca Aset Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	1.00 Dokumen	Tersedianya Neraca Asset yang sesuai dengan bukti fisik BMD yang benar	100%	94.788.195,00	68.750.000,00		

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.01.03.3.01.03.03.15.040.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah			Kabupaten Sumedang			Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56.00 SKPD	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	399.999.999,00	400.000.000,00		
<b>TOTAL</b>											<b>13.215.747.346,00</b>	<b>18.631.205.471,00</b>		





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	139,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	160,034,000
5.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 Persen	230,000,000			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	264,500,000
5.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Kebersihan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 Persen	212,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	243,984,000
5.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Jenis	100 Persen	295,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	339,708,850
5.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Jenis	100 Persen	326,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	375,084,000
5.02.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Jenis	100 Persen	1,195,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,375,124,000
5.02.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Surat Kabar	100 Persen	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	41,400,000
5.02.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 Persen	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	184,000,000
5.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 Persen	208,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	239,959,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 Kali	100 Persen	878,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,009,700,000
5.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 Persen	484,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	556,784,000
5.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Kendaraan dinas	100 Persen	275,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	317,009,000
5.02.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	448 unit	100 Persen	8,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9,384,000
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>5,710,730,151</b>					<b>6,567,339,674</b>
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>2,883,536,256</b>					<b>3,316,066,694</b>
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	321,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	369,150,000
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	284,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	327,060,000
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	185,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	213,555,000
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	208,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	239,890,000
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Murni 2. Jumlah Hasil Evaluasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	6 Dokumen	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	488,750,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 2. Jumlah Dokumen Perubahan APBD 3. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 4. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	6 Dokumen	463,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	533,025,000
5.02.02.2.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	6 Dokumen	463,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	533,226,250
5.02.02.2.01.09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi 2. Buku Saku tentang APBD Murni dan P APBD	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 SKPD/Buku	6 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	115,000,000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Meningkatnya Wawasan Tim Verifikator	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TAPD	6 Dokumen	381,661,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	438,910,444
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	57,500,000
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								<b>1,100,999,999</b>					<b>1,266,149,999</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Bukti Kas Umum	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	6 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen BKU Pembiayaan	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	12 Dokumen	1 Dokumen	133,333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153,333,333
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah LKT, Berita Acara Rekonsiliasi Dana Transfer, Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	12 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	SP2D, Advis, Register Serah Terima SP2D	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	10000 SP2D	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	230,000,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPI Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	55 SKPD	1 Dokumen	133,333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153,333,333
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Laporan Posisi Kas, Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Pusat	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	14 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen data piutang dan hutang daerah, Jumlah Dokumen Pentertan Modal	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Berita Acara Rekonsiliasi	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	2 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	230,000,000
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPI)	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Buku Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	133,333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153,333,333
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Surat Pencairan Dana (SPD)	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	275 SPD	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>							<b>1,726,193,896</b>						<b>1,985,122,981</b>
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran hasil konsolidasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	12 Dokumen	2 Dokumen	294,915,100			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	339,152,365
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 perda	2 Dokumen	146,578,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	168,565,304





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen RKBMD 2. Dokumen perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan dinas operasional 3. Dokumen Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	9 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	86,250,000
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen RKPBM	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	5 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	28,750,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Monev SKPD 2. Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu 3. Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui 4. Jumlah dokumen perda dan perbup	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	24 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	410,713,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	472,320,174
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Identifikasi BMD 2. Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	61 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	178,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	205,562,500
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Database barang milik daerah yang teregister 2. Dokumen berita acara pemeriksaan (pemantauan dan pengamanan)	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	3 Dokumen	1 Dokumen	414,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	476,502,500
5.02.03.2.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	5 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	172,500,000
5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah 2. Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	6 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	230,000,000
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	57,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	4 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	138,000,000
5.02.03.2.01.13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah SKPD Peserta Bimtek 2. Jumlah pengelola barang milik daerah yang dibina	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	55 SKPD	1 Dokumen	265,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	305,813,750
<b>TOTAL</b>									<b>91,008,227,029</b>				<b>104,659,461,084</b>	



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

#### 4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

##### A. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

##### B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### 4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

##### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
7. Penyedia Jasa Kebersihan
8. Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang

9. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah (Profil SKPD)
10. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9. Penyedia Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Komputer

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
2. Penilaian Kinerja Aparatur
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

**F. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.**

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

**G. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD**

1. Pengelolaan data kepegawaian



## **H. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2. Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
3. Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran
4. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
5. Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
6. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD
9. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
10. Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
11. Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
12. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
13. Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD
14. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peningkatan Kapasitas TAPD
16. Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer
17. Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan
18. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
19. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
21. Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua
22. Penyusunan RKBMD dan RKPBM
23. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah
24. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
25. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

26. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
27. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
28. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Pengelolaan Kas Daerah
30. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
32. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan
33. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
34. Identifikasi Belanja Modal SKPD
35. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
36. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
37. Inventarisasi Aset
38. Penyusunan Neraca Aset Daerah



Tabel 4.1

**RUMUSAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Organisasi / SKPD : 3.01.03.03. -BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 1 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.	KEUANGAN				5.615.279.000,00				7.499.425.825,00
3.01.03.3.01.03.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		-	3.694.932.000,00				4.536.401.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Input : Jumlah Dana Output : Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Sumedang	12.00 bulan 100%	610.660.000,00			12.00 bulan 100%	671.726.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Sumedang	12.00 bulan 100%	1.440.305.000,00			12.00 Bulan 100%	1.691.035.500,00
3.01.03.3.01.03.03.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Jumlah Dana Output : Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparat	Kabupaten Sumedang	19.00 Surat Kabar 100%	30.250.000,00			19.00 Surat Kabar 100%	33.275.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Input : Jumlah Dana Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Sinerginya Pembangunan	Kabupaten Sumedang	75.00 kali 100%	649.065.000,00			75.00 kali 100%	514.947.300,00
3.01.03.3.01.03.03.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Input : Jumlah Dana Output : Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi Outcome : Tersampainya Informasi Pembangunan	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	67.733.000,00			1.00 Paket 100%	129.506.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Input : Jumlah Dana Output : Tenaga Operasional Pengamanan	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket	200.038.500,00			1.00 Paket	242.042.350,00
3.01.03.3.01.03.03.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Outcome : Terciptanya Pengamanan Kantor Input : Jumlah Dana Output : Jasa Kebersihan	Kabupaten Sumedang	100% 1.00 Paket	281.678.500,00			100% 1.00 Paket	353.846.350,00
3.01.03.3.01.03.03.01.014.	Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang	Outcome : Terciptanya Kebersihan di Ruang terbuka hijau Input : Jumlah Dana Output : Barang ATK dan Cetakan	Kabupaten Sumedang	100% 1.00 Paket	364.952.000,00			100% 1.00 Paket	467.447.200,00
3.01.03.3.01.03.03.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Outcome : Terfasilitasinya pelayanan ketatausahaan se-Kabupaten Sumedang Input : Jumlah Dana Output : Profil BPKAD	Kabupaten Sumedang	100% 1.00 Dokumen	50.250.000,00			100% 1.00 Dokumen	199.650.000,00
3.01.03.3.01.03.03.01.024.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Outcome : Tersedianya Informasi tentang BPKAD Input : Jumlah Dana Output : SOP BPKAD Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	100% - -	-			100% 1.00 Dokumen	232.925.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	1.127.677.000,00				1.956.246.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Gedung Kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan gedung kantor	Kabupaten Sumedang	1 paket 100%	50.000.000,00			0.00 - 100%	-
3.01.03.3.01.03.03.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Perlengkapan Kantor Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	419.271.000,00			1.00 Paket 100%	626.999.400,00
3.01.03.3.01.03.03.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang		50.000.000,00				-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Penataan Halaman Kantor/gedung kantor Outcome : Tercapainya kenyamanan dalam melakukan aktifitas kinerja bagi aparatur Input : Jumlah Dana Output : Gedung Kantor yang di Pelihara	Kabupaten Sumedang	1 - 100%	90.492.000,00			0.00 - 100%	264.541.200,00
3.01.03.3.01.03.03.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terciptanya kenyamanan kantor Input : Jumlah Dana Output : Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	256.000.000,00			1.00 Paket 100%	556.600.000,00
3.01.03.3.01.03.03.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Output : lancarnya tugas kedinasan Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Kantor	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	151.914.000,00			1.00 Paket 100%	387.105.400,00
3.01.03.3.01.03.03.02.016.	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Output : Terciptanya kenyamanan kantor/gedung kantor Input : Jumlah Dana Output : Rumah Dinas Outcome : Lancarnya pelayanan jabatan/kedinasan	Kabupaten Sumedang	3.00 Jenis 100%	110.000.000,00			3.00 Jenis 100%	121.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		-	184.162.000,00				202.578.200,00
3.01.03.3.01.03.03.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Dinas	Kabupaten Sumedang	108.00 stel	41.624.000,00			108.00 stel	45.786.400,00
3.01.03.3.01.03.03.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Batik Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur	Kabupaten Sumedang	100% 108.00 stel 100%	41.624.000,00			100% 108.00 stel 100%	45.786.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Input : Jumlah Dana Output : Pakaian Olahraga Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur	Kabupaten Sumedang	108.00 stel 100%	100.914.000,00			108.00 stel 100%	111.005.400,00
3.01.03.3.01.03.03.005.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	167.508.000,00				184.259.025,00
3.01.03.3.01.03.03.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan kapasitas aparatur BPKAD Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	Kabupaten Sumedang	1.00 Paket 100%	167.508.000,00			1.00 Paket 100%	184.259.025,00
3.01.03.3.01.03.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		-	250.750.000,00				413.636.600,00
3.01.03.3.01.03.03.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Input : Jumlah Dana Output : Laporan Kinerja BPKAD Outcome : Terevaluasinya Kinerja SKPD	Kabupaten Sumedang	6.00 Dokumen 100%	160.000.000,00			6.00 Dokumen 100%	313.811.600,00
3.01.03.3.01.03.03.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input : Jumlah Dana Output : Laporan Keuangan BPKAD Outcome : Terevaluasinya Keuangan BPKAD	Kabupaten Sumedang	12.00 dokumen 100%	90.750.000,00			12.00 dokumen 100%	99.825.000,00
3.01.03.3.01.03.03.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		-	160.000.000,00				173.030.000,00
3.01.03.3.01.03.03.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Input : Jumlah Dana Output : Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA Outcome : Terarahnya pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Sumedang	6.00 Dokumen 100%	160.000.000,00			6.00 Dokumen 100%	173.030.000,00
3.01.03.3.01.03.03.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD		-	30.250.000,00				33.275.000,00
3.01.03.3.01.03.03.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Input : Jumlah Dana Output : Data Kepegawaian BPKAD	Kabupaten Sumedang	4.00 Dokumen	30.250.000,00			4.00 Dokumen	33.275.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai		100%				100%	
3.01.03.	KEUANGAN				7.600.468.346,00				11.131.779.646,00
3.01.03.3.01.03.03.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran, Dokumen Pengajuan Pembayaran, Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD, Keakuratan Penatausahaan Aset		-	7.600.468.346,00				11.131.779.646,00
3.01.03.3.01.03.03.15.001.	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen APBD Perubahan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang		171.200.000,00	APBD Kabupaten		4.00 Dokumen 100%	334.804.800,00
3.01.03.3.01.03.03.15.004.	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni Outcome : Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	Kabupaten Sumedang		351.150.000,00	APBD Kabupaten		2.00 Dokumen 100%	24.300.900,00
3.01.03.3.01.03.03.15.005.	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD yang Diverifikasi Outcome : Meningkatnya efektifitas Rancangan Penggunaan Anggaran T.A. 2021	Kabupaten Sumedang		185.700.000,00	APBD Kabupaten		56.00 SKPD 100%	3.700.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.006.	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen APBD Perubahan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Sumedang		292.300.000,00	APBD Kabupaten		2.00 Raperda, Raperbup 100%	279.609.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.007.	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen APBD Murni Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	2.00 Raperda, Raperbup 100%	329.000.000,00	APBD Kabupaten		2.00 Raperda, Raperbup 100%	279.609.300,00
3.01.03.3.01.03.03.15.008.	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD yang Diverifikasi Outcome : Optimalnya Efektivitas Pengguna Anggaran	Kabupaten Sumedang	56.00 SKPD 100%	208.600.000,00			56.00 SKPD 100%	353.163.800,00
3.01.03.3.01.03.03.15.009.	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan Outcome : Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Kabupaten Sumedang	2.00 Dokumen 100%	284.400.000,00			2.00 Dokumen 100%	134.934.396,00
3.01.03.3.01.03.03.15.012.	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah Outcome : Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	6 Raperbup, Rakepbup, Raperda 100%	305.300.000,00			6 Raperbup, Rakepbup, Raperda 100%	310.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.014.	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	Kabupaten Sumedang	1 kali sosialisasi, 2 Buku APBD	373.286.256,00			1 kali sosialisasi, 2 Buku APBD	572.857.150,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.018.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Outcome : Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan penganggaran daerah Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Kabupaten Sumedang	100%  1.00 Laporan	228.423.000,00			100%  1.00 Laporan	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.019.	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Outcome : Terukurnya Kinerja Keuangan Pemda Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	100%  1.00 Raperda	292.802.350,00			100%  1.00 Raperda	700.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.021.	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	Outcome : Tersusunnya Buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 Input : Jumlah Dana Output : Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Kabupaten Sumedang	100%  1.00 Sistem	180.560.000,00			100%  1.00 Sistem	200.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.022.	Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Outcome : Laporan Keuangan berbasis akrual yang akurat dan tepat waktu Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD yang dikelola	Kabupaten Sumedang	100%  2.00 Dokumen	75.000.000,00			100%  2.00 Dokumen	100.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.023.	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Outcome : Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Barang Milik Daerah Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	100%  5 Dokumen	414.350.000,00			100%  5 Dokumen	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.024.	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Outcome : Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Kabupaten Sumedang	100%  56.00 Berita Acara	120.000.000,00			100%  56.00 Berita Acara	120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.027.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Outcome : Tersusunnya Neraca Aset yang Disertai dengan Daftar Rincian BMD yang Benar Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Kabupaten Sumedang	100%	382.600.000,00			100%	440.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.029.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Outcome : Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Rancangan Perbup Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Kabupaten Sumedang	56.00 SKPD	295.925.000,00			56.00 SKPD	110.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.030.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Outcome : Meningkatnya Wawasan Pengurus Barang Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD yang dikelola	Kabupaten Sumedang	100%	400.000.000,00			100%	400.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.031.	Pengelolaan Kas Daerah	Outcome : Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Sumedang	56.00 SKPD	301.000.000,00			56.00 SKPD	200.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.033.	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Outcome : Tersedianya Data Yang Akurat Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SKPD yang dikelola	Kabupaten Sumedang	1.00 Dokumen	746.351.645,00			1.00 Dokumen	500.000.000,00
				100%				100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.034.	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	<b>Outcome</b> : Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Dokumen LRA	Kabupaten Sumedang	100%	278.057.100,00			100%	500.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.035.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	<b>Output</b> : Jumlah Dokumen LRA <b>Outcome</b> : Buku Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III dan Semester I, II T.A 2019 <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	Kabupaten Sumedang	24.00 Dokumen 100%	410.713.000,00			24.00 Dokumen 100%	350.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.036.	Identifikasi Belanja Modal SKPD	<b>Output</b> : Meningkatkan Efektivitas dan Efesiensi Penggunaan BMD dan Tertibnya Penatausahaan BMD <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	Kabupaten Sumedang	100%	240.211.801,00			100%	75.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.037.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tertibnya Aset <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	Kabupaten Sumedang	100%	110.000.000,00			100%	210.000.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.038.	Inventarisasi Aset	<b>Output</b> : Terpilihannya Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Kabupaten Sumedang	100%	128.750.000,00			100%	68.750.000,00
3.01.03.3.01.03.03.15.039.	Penyusunan Neraca Aset Daerah	<b>Output</b> : Terbentuknya buku inventarisasi aset dan terpeliharanya data KIB dan KIR SKPD <b>Input</b> : Jumlah Dana	Kabupaten Sumedang	100%	94.788.195,00			100%	68.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.03.3.01.03.03.15.040.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	<b>Output</b> : Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu <b>Outcome</b> : Tersedianya Neraca Asset yang sesuai dengan bukti fisik BMD yang benar <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah SKPD Peserta Bimtek <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	1.00 Dokumen  100%  56.00 SKPD 100%	399.999.999,00			1.00 Dokumen  100%  56.00 SKPD 100%	400.000.000,00
	<b>TOTAL SUMBER DANA APBD</b>				-				-
	<b>TOTAL SUMBER DANA APBD Prov</b>				-				-
	<b>TOTAL SUMBER DANA APBN</b>				-				-
	<b>TOTAL</b>				<b>13.215.747.346,00</b>				<b>18.631.205.471,00</b>

Sumedang, 23 Agustus 2020  
Kepala

UUS SUNDAPAN, SE.MM  
19601023 198302 1 001





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	139,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	160,034,000
5.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 Persen	230,000,000			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	264,500,000
5.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Kebersihan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 Persen	212,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	243,984,000
5.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Jenis	100 Persen	295,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	339,708,850
5.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Jenis	100 Persen	326,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	375,084,000
5.02.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Jenis	100 Persen	1,195,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,375,124,000
5.02.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Surat Kabar	100 Persen	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	41,400,000
5.02.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 Persen	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	184,000,000
5.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 Persen	208,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	239,959,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 Kali	100 Persen	878.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.009.700,000
5.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 Persen	484.160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	556.784,000
5.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Kendaraan dinas	100 Persen	275.660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	317.009,000
5.02.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	448 unit	100 Persen	8.160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.384,000
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>5.710.730,151</b>					<b>6.567.339,674</b>
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>2.883.536,256</b>					<b>3.316.066,694</b>
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	321.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	369.150,000
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	284.400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	327.060,000
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	185.700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	213.555,000
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	208.600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	239.890,000
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Murni 2. Jumlah Hasil Evaluasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	6 Dokumen	425.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	488.750,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 2. Jumlah Dokumen Perubahan APBD 3. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 4. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	6 Dokumen	463,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	533,025,000
5.02.02.2.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	6 Dokumen	463,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	533,226,250
5.02.02.2.01.09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	1. Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi 2. Buku Saku tentang APBD Murni dan P APBD	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 SKPD/Buku	6 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	115,000,000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Meningkatnya Wawasan Tim Verifikator	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TAPD	6 Dokumen	381,661,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	438,910,444
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Kebijakan Keuangan Daerah Berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SKPD	6 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	57,500,000
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								<b>1,100,999,999</b>					<b>1,266,149,999</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Bukti Kas Umum	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	6 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen BKU Pembiayaan	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	12 Dokumen	1 Dokumen	133,333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153,333,333
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah LKT, Berita Acara Rekonsiliasi Dana Transfer, Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	12 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	SP2D, Advis, Register Serah Terima SP2D	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	10000 SP2D	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	230,000,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	55 SKPD	1 Dokumen	133.333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153.333,333
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Laporan Posisi Kas, Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Pusat	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	14 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen data piutang dan hutang daerah, Jumlah Dokumen Pentertan Modal	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Berita Acara Rekonsiliasi	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	2 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	230,000,000
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPI)	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Buku Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	133.333,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	153.333,333
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Surat Pencairan Dana (SPD)	Tersedianya Data yang Akurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	275 SPD	1 Dokumen	60,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	69,230,000
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>								<b>1,726,193,896</b>					<b>1,985,122,981</b>
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran hasil konsolidasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	12 Dokumen	2 Dokumen	294,915,100			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	339,152,365
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 perda	2 Dokumen	146,578,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	168,565,304

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 perkara	2 Dokumen	149,853,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	172,331,376
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Laporan Keuangan Pemda Unaudited dan Audited	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	2 Dokumen	219,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	252,997,700
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Kertas Kerja Jumlah Hasil Koreksi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	2 Dokumen	25,767,751	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	29,632,914
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Berita Acara Rekonsiliasi LRA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	55 Berita Acara	2 Dokumen	139,708,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	160,665,235
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Buku Profil Keuangan Pemda	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Buku	2 Dokumen	40,983,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	47,130,450
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Buku	2 Dokumen	123,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	142,520,650
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Sisdur Akuntansi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	2 Dokumen	39,058,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	44,916,700
5.02.02.2.03.11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah-jumlah Memorial dan Lampirannya	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	2 Dokumen	71,872,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	82,653,662
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	55 Petugas Akuntansi	2 Dokumen	473,527,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	95 %	544,556,625
5.02.03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>							<b>1,889,738,195</b>					<b>2,173,198,924</b>
5.02.03.2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							<b>1,889,738,195</b>					<b>2,173,198,924</b>



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen RKBMD 2. Dokumen perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan dinas operasional 3. Dokumen Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	9 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	86,250,000
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen RKBMD	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	5 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	28,750,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Money SKPD 2. Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu 3. Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui 4. Jumlah dokumen perda dan perbup	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	24 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	410,713,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	472,320,174
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Identifikasi BMD 2. Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	61 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	178,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	205,562,500
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Database barang milik daerah yang teregister 2. Dokumen berita acara pemeriksaan (pemantauan dan pengamanan)	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	3 Dokumen	1 Dokumen	414,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	476,502,500
5.02.03.2.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	5 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	172,500,000
5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah 2. Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	6 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	230,000,000
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90 %	57,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	4 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	90 %	138,000,000
5.02.03.2.01.13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	1. Jumlah SKPD Peserta Bimtek 2. Jumlah pengelola barang milik daerah yang dibina	Tertibnya Aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 %	55 SKPD	1 Dokumen	265,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	90 %	305,813,750
<b>TOTAL</b>									<b>91,008,227,029</b>					<b>104,659,461,084</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus memiliki rencana kerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.

Sehubungan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sumedang dan dapat mempertahankan predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun tahun berikutnya.

Namun demikian keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana kerja tahun 2021 ini merupakan acuan khususnya bagi penyelenggara yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan

peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang di tahun mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya

Demikian, semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat direalisasikan sesuai harapan yang diinginkan.

Sumedang, Agustus 2020

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Kepala,



**UUS SUNDAWAN, SE., MM**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19601023 198302 1 001